

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan teori yang digunakan sebuah perusahaan untuk mendasari praktis bisnisnya. Menurut Scott (2012:305), teori keagenan dalam perusahaan untuk mengidentifikasi adanya pihak-pihak dalam perusahaan yang memiliki berbagai kepentingan untuk mencapai tujuan dalam kegiatan perusahaan. Teori ini menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dan juga manajer. Pemilik perusahaan atau investor mempunyai keinginan agar laba seolah tampak tidak besar untuk menghindari pajak yang terlalu besar. Namun, manajer perusahaan mempunyai keinginan sebaliknya yaitu agar laba perusahaan terlihat besar agar kinerja manajer sendiri terlihat baik (Rohmansyah,2019).

Hal ini menimbulkan masalah antara kedua pihak yang memiliki kepentingan masing-masing. Kondisi ini semakin diperkuat dengan adanya tindakan *agent* sebagai pelaksana operasional perusahaan memiliki informasi internal lebih banyak dibandingkan *principal*. Untuk hal ini, *principal* memberikan sebuah otoritas dan kewenangan kepada *agent* untuk menjalankan perusahaan namun demi kepentingan *principal* Investor menginginkan return yang besar atas investasi yang mereka tanamkan di perusahaan, sedangkan manajer menginginkan kompensasi yang besar atas usaha yang telah mereka lakukan demi kelangsungan perusahaan.

Konflik keagenan ini dapat dikurangi dengan adanya sebuah mekanisme pengawasan. Mekanisme pengawasan yang dapat mengurangi konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* dikenal dengan mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG). *Corporate Governance* yang merupakan sebuah

konsep yang berdasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai salah satu hal yang memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan.

Manajer dalam mencapai hubungan yang baik antara perusahaan dengan investor maka akan menerapkan konsep prudent yang dulu nya kita kenal sebagai konservatisme. Manajer wajib mengungkapkan semua biaya dengan sebenarnya sehingga investor akan percaya dengan apa yang di ungkapkan oleh perusahaan (Sinambela,2018). Selain itu prudent akuntansi pun diharapkan mampu mencegah perilaku manager dalam melakukan kecurangan atau memanipulasi laporan keuangan serta mengurangi biaya agensi hal ini ditakutkan akan terjadi akibat dampak perbedaan pendapat antara pihak *principal* dan *agent* sehingga mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan perusahaan (Saragih, 2019). Dengan demikian, tidak ada lagi salah paham antara manajer dan perusahaan serta manajer dan investor.

Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi juga menunjukkan kemakmuran *stakeholder* yang juga tinggi (Marini, 2017). Nilai perusahaan yang tinggi harus didukung dengan *agent* dan *principal* guna mencapai tujuan bersama di bantu dengan mekanisme *Good Corporate Governance* dan Prudent akuntansi dalam mengatasi konflik diantara keduanya.

## **2.2 Nilai Perusahaan**

Perusahaan adalah organisasi yang mencari keuntungan. Tujuan perusahaan ada dua macam yaitu memaksimalkan keuntungan dan kemakmuran untuk pemilik perusahaan dan para investor. Menurut Harmono (2014) Nilai Perusahaan adalah kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh harga saham yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran pasar modal yang merefleksikan penilaian masyarakat terhadap kinerja perusahaan. Menurut Maya Septiyuliana (2016) nilai perusahaan

yaitu sering dikaitkan dengan harga saham. Semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi pula nilai perusahaan, bahwa dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang merupakan tujuan perusahaan.

Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Berbagai kebijakan yang diambil oleh manajemen dalam upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik dan para pemegang saham yang tercermin pada harga saham (Bringham dan Daves, 2014). Nilai perusahaan juga dapat menunjukkan nilai asset yang dimiliki perusahaan seperti surat-surat berharga. Nilai perusahaan yang dibentuk melalui indikator nilai pasar saham sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang dari investasi. Adanya peluang investasi memberikan sinyal yang positif tentang pertumbuhan perusahaan di masa depan, sehingga akan meningkatkan harga saham, yang pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan (Wilyantara, 2018).

Bagi perusahaan yang sudah *go public* memungkinkan masyarakat maupun manajemen untuk mengetahui nilai perusahaan tersebut. Nilai perusahaan dapat terlihat dari seberapa besar kekuatan tawar-menawar harga saham perusahaan. Apabila perusahaan ditaksir mempunyai prospek yang baik di masa depan maka nilai saham akan semakin tinggi. Dan sebaliknya apabila perusahaan di taksir tidak mempunyai prospek yang baik di masa depan maka nilai sahamnya akan rendah.

Beberapa konsep nilai yang menjelaskan nilai suatu perusahaan (Rajab, 2017) yaitu:

1. Nilai nominal, nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan dan juga ditulis jelas dalam surat saham kolektif.

2. Nilai pasar, nilai pasar disebut juga kurs merupakan harga yang terjadi dari proses tawar menawar dipasar saham. Nilai ini hanya biasa ditentukan jika saham perusahaan dijual di pasar saham.
3. Nilai intrinsik, nilai instrinsik merupakan nilai yang mengacu pada perkiraan nilai riil suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan sekedar harga dari sekumpulan asset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan dikemudian hari.
4. Nilai buku, nilai buku merupakan nilai perusahaan yang dihitung dengan konsep dasar akuntansi.
5. Nilai likuidasi, nilai likuidasi merupakan nilai jual seluruh asset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai sisa itu merupakan bagian para pemegang saham. Nilai likuidasi biasa dihitung berdasarkan neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan dilikuidasi.

Pengukuran Nilai Perusahaan Menurut (Brigham dan Daves, 2014) dalam rasio penilaian perusahaan terdiri dari :

a. *Price Earning Ratio* (PER)

Menurut Tandelilin (2010), PER adalah perbandingan antara harga saham perusahaan dengan earning per share dalam saham. PER adalah fungsi dari perubahan kemampuan laba yang diharapkan di masa yang akan datang. Semakin besar PER, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk tumbuh sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

b. *Price to Book Value* (PBV)

Menurut Afzal (2012), PBV menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, berarti pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut. PBV juga menunjukkan seberapa jauh suatu perusahaan mampu menciptakan nilai

perusahaan yang relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. PBV juga dapat berarti rasio yang menunjukkan apakah harga saham yang diperdagangkan *overvalued* (di atas) atau *undervalued* (di bawah) nilai buku saham tersebut.

c. *Tobin's Q*

Salah satu alternatif yang digunakan dalam menilai nilai perusahaan adalah dengan menggunakan *Tobin's Q*. *Tobin's Q* ini dikembangkan oleh professor James Tobin (Weston dan Copeland, 2010). Rasio ini merupakan konsep yang sangat berharga karena menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap dolar investasi inkremental. *Tobin's Q* dihitung dengan membandingkan rasio nilai pasar saham perusahaan dengan nilai buku ekuitas perusahaan.

Investor mengetahui nilai pasar perusahaan melalui beberapa rasio. Rasio tersebut dapat memberikan indikasi bagi manajemen mengenai penilaian investor terhadap kinerja perusahaan di masa lampau dan prospeknya di masa depan (Puspitasari, 2017). Ada berbagai macam rasio dalam menghitung nilai perusahaan, antara lain *Tobin's Q*. Rasio ini dinilai bisa memberikan informasi paling baik karena dalam *Tobin's Q* semua unsur hutang dan modal saham perusahaan dihitung, tidak hanya saham biasa saja dan tidak hanya ekuitas perusahaan yang dimasukkan namun seluruh aset perusahaan (Puspitasari, 2017).

Menurut Sianturi (2015), indikator yang digunakan sebagai parameter untuk mengukur nilai perusahaan adalah *Tobin's Q* yang merupakan salah satu rasio yang paling rasional dan rasio ini dinilai bisa memberikan informasi yang paling baik, karena rasio ini bisa menjelaskan berbagai fenomena dalam kegiatan perusahaan yang membandingkan nilai pasar saham suatu perusahaan yang terdaftar di pasar keuangan dengan nilai penggantian aset. *Tobin's Q* memasukkan semua unsur hutang dan modal saham perusahaan, tidak hanya ekuitas perusahaan yang dimasukkan namun seluruh aset perusahaan.

## **2.3 Good Corporate Governance**

### **2.3.1 Pengertian Good Corporate Governance**

*Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Definisi lain menurut *Forum Good Corporate Governance on Indonesia (FCGI)* *Good Corporate Governance* adalah hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain merupakan suatu sistem yang mengendalikan perusahaan (Effendi,2016).

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mengelola resiko, mengarahkan dan mengendalikan perusahaan demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang mengatur 3 (tiga) komponen utama perusahaan yaitu pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi. Tujuan dari penerapan *Good Good Corporate Governance* pada suatu perusahaan untuk melindungi pemegang saham dari kecurangan atau penipuan yang dilakukan oleh pihak direksi maupun komisaris (Effendi,2016).

### **2.3.2 Tujuan dan Manfaat Good Good Corporate Governance**

Tujuan dari *Good Good Corporate Governance* untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Menurut (Surya, 2006), penerapan *good Good Corporate Governance* secara konkret memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut:

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
2. Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah.
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.

4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Manfaat *Good Corporate Governance* menurut *Forum Good Corporate Governance on Indonesia* (FCGI) adalah:

1. Untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan pemegang saham dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, reliabilitas, tanggung jawab, dan keadilan dalam rangka memperkuat posisi perusahaan kompetitif baik domestik maupun internasional, dan untuk menciptakan lingkungan yang sehat untuk mendukung investasi.
2. Untuk mendorong manajemen perusahaan untuk berperilaku secara profesional, transparan, dan efisien, serta mengoptimalkan penggunaan dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris, direksi dan RUPS.
3. Untuk mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris dan direksi untuk membuat keputusan dan untuk bertindak dengan rasa moralitas yang ketat, sesuai dengan peraturan yang berlaku yang memiliki kekuatan hukum, dan sesuai dengan tanggung jawab sosial mereka terhadap berbagai stakeholder dan perlindungan lingkungan. Dari tujuan dan manfaat tersebut maka perusahaan yang telah melaksanakan dan menerapkan *good Good Corporate Governance* akan melindungi kepentingan pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan perusahaanpun akan dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik terhadap perusahaan.

### **2.3.3 Prinsip *Good Good Corporate Governance***

Menurut Soemarso dalam bukunya *Etika dalam bisnis & Profesi Akuntansi dan Tata kelola Perusahaan* (Soemarso, 2018), mengartikan lima prinsip *Good Corporate Governance* yaitu :

1. **Transparansi**, yaitu perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang didisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.
2. **Akuntabilitas**, yaitu perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.
3. **Responsibilitas**, yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan sebagai *good corporate citizen*.
4. **Independensi**, yaitu perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak diintervensi oleh pihak lain.
5. **Kewajaran dan kesetaraan**, suatu perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dalam suatu perusahaan maka perusahaan wajib melaksanakan tatakelola perusahaan sesuai dengan peraturan yang ada, agar kualitas dari laporan yang dipublikasikan kepada publik sesuai



dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Dalam melaksanakan *Good Corporate Governance* perusahaan harus memastikan bahwa setiap tugas yang diberikan kepada pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* sudah baik dan tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki (Wicaksono, 2015).

#### **2.3.4 Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional sangat berperan dalam mengawasi perilaku manajer sehingga kualitas laporan keuangan dapat terjaga dengan baik. (Roberts, 2009) mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional yang besar dapat memberikan insentif untuk melakukan pengawasan atau monitoring yang lebih ketat terhadap pihak manajemen sehingga mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan kepentingan investor institusional menjadi semakin besar dalam entitas tersebut sehingga salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan adalah kepemilikan institusional. Oleh karena itu, kepemilikan institusional yang semakin besar dalam suatu perusahaan akan mengurangi probabilitas terjadinya fraud pada laporan keuangan (Anggara, 2014).

Penelitian ini mengukur kepemilikan institusional (Wang et al, 2010) mengukur kepemilikan institusional dengan persentase proporsi saham yang dimiliki oleh institusional atau suatu institusi pada akhir tahun dibandingkan dengan total jumlah saham yang beredar. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen (Dian, 2014).

Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan, semakin tinggi kepemilikan institusional pada suatu perusahaan maka akan semakin kuat kontrol eksternal terhadap perusahaan dan mengurangi agency cost, sehingga perusahaan akan menggunakan dividen

yang rendah. Dengan adanya kontrol yang ketat, menyebabkan manajer menggunakan hutang pada tingkat rendah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya financial distress dan risiko kebangkrutan (Nuraina, 2012).

Kepemilikan institusional pada umumnya memiliki proporsi kepemilikan dalam jumlah yang besar sehingga proses monitoring terhadap manajer menjadi lebih baik, Semakin besar kepemilikan institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat (Wiranata, 2013).

### **2.3.5 Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan Manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola (Agnes, 2013). Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh direktur dan komisaris. Kepemilikan manajerial dapat mengurangi konflik keagenan karena apabila pihak manajemen mempunyai bagian dari perusahaan maka manajemen akan maksimal dalam menjalankan aktivitas perusahaan dan mengurangi kecurangan yang terjadi didalam manajemen (Dian, 2014). Dalam kepemilikan ini, manajer perusahaan selain sebagai pengelola juga bertindak sebagai emegang saham pada perusahaan tersebut.

Menurut (Widarjo et. al., 2010) Manajer dengan kepemilikan saham yang tinggi dalam perusahaan akan berusaha meningkatkan kinerja perusahaan, karena dengan meningkatnya laba perusahaan maka insentif yang diterima oleh manajer akan meningkat pula. Sebaliknya, apabila kepemilikan saham oleh manajer itu rendah, maka akan meningkatkan biaya keagenan. Hal ini dikarenakan manajer tidak akan melakukan hal yang memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, namun manajer akan melakukan hal demi kepentingannya sendiri dengan menggunakan sumber daya perusahaan.

Meningkatkan kepemilikan manajerial digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah yang ada di perusahaan. Dengan meningkatnya kepemilikan manajerial maka manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dalam hal ini akan berdampak baik kepada perusahaan serta memenuhi keinginan dari para pemegang saham. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerjanya karena manajemen mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan, karena manajemen akan ikut merasakan manfaat secara langsung dari keputusan yang diambil. Selain itu manajemen juga ikut mengganggu kerugian apabila keputusan yang diambil oleh mereka salah (Dian, 2014).

### **2.3.6 Ukuran Dewan Komisaris**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014, menyatakan bahwa dewan komisaris adalah Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komisaris adalah organ emiten atau perusahaan publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Cakupan pengawasan yang dilakukan dewan komisaris meliputi kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya (Soemarso, 2018). Dalam pelaksanaan kegiatan operasional di suatu perusahaan, maka dewan komisaris akan memantau jalannya kegiatan perusahaan dan memberikan nasihat kepada manajemen bila manajemen ingin membuat suatu keputusan yang mungkin berhubungan pada stakeholder (Soemarso, 2018).

Adanya kepentingan dari masing-masing manajemen yang dapat membuat manajemen melakukan kecurangan dalam laporan keuangan. Untuk mengatasinya dewan komisaris diperbolehkan untuk memiliki akses pada informasi perusahaan. Dewan komisaris tidak memiliki otoritas dalam perusahaan, maka dewan direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait dengan perusahaan kepada dewan komisaris (NCCG, 2001). Keberhasilan dalam melaksanakan *Good*

*Corporate Governance* pada organisasi atau perusahaan menjadi tanggung jawab dari dewan komisaris, begitu juga dengan pengawasan terhadap adanya kecurangan dalam pelaporan keuangan kepada publik. Dewan komisaris dapat diukur dengan jumlah dewan komisaris yang terdapat dalam perusahaan (Salim, 2017).

### **2.3.7 Ukuran Komite Audit**

Komite audit merupakan suatu komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan terhadap perusahaan. Komite audit memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good Good Corporate Governance* (Mubarok dan Rohman, 2013). Menurut teori keagenan, ukuran komite audit sebagai komite penunjang dewan komisaris diperkirakan dapat mempengaruhi praktik pengungkapan risiko perusahaan (Mubarok dan Rohman, 2013).

Perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggungjawab, terbuka, dalam pelaporan keuangan dan menghindari praktik manipulasi pengungkapan informasi mengenai risiko karena komite audit akan memonitor kegiatan yang ada di perusahaan. Sehingga dengan semakin besarnya ukuran komite audit, maka akan semakin besar juga pengawasan yang harus dilakukan atas luas informasi yang diungkapkan dalam 18 annual report. Ukuran komite audit adalah jumlah orang yang berperan menjadi anggota dalam komite audit. Jumlah tersebut menjadi proksi dalam mewakili ukuran komite audit yang dapat menjelaskan pengaruhnya dengan pengungkapan risiko di annual report perusahaan (Kencana dan Lastanti, 2018).

### **2.3.8 Prudent Akuntansi**

Standar akuntansi yang ada di Indonesia yaitu PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang sebelumnya berkiblat pada *Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)*, telah dikonvergensi ke dalam IFRS

(International Financial Reporting Standard) karena Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mencanangkan program konvergensi PSAK ke IFRS pada Desember 2007 (Yustina, 2013).

Penerapan ini dimaksudkan agar daya informasi laporan keuangan dapat meningkat semakin lebih baik sehingga laporan keuangan dapat lebih mudah dipahami dan mudah digunakan bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkannya. Selain itu konvergensi IFRS juga bertujuan agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang memiliki akuntabilitas tinggi dan menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan akurat. Dengan konvergensi IFRS diharapkan tidak diperlukannya lagi rekonsiliasi antara laporan keuangan menurut PSAK dengan laporan keuangan menurut IFRS. Salah satu manfaat konvergensi adalah sebagai daya tarik minat investor, dengan adanya transparansi dan kemudahan dalam memahami laporan keuangan yang telah memakai standar yang berlaku secara internasional. Hal ini sejalan dengan kesepakatan pemerintah Indonesia sebagai anggota G20. Sejak tahun 2010, prinsip konservatisme akuntansi sudah tidak lagi digunakan. IFRS telah memperkenalkan prinsip baru yaitu prudence yang menggunakan current value sebagai indikator pengukuran laporan keuangan yang dapat dimengerti, relevan, dan dapat diandalkan sebanding sebagai pengganti prinsip konservatisme. Prudence yang dimaksudkan dalam IFRS berkaitan dengan adanya revenue recognition yaitu pendapatan dapat diakui walaupun dalam bentuk potensi, selama memenuhi ketetapan dari pengakuan pendapatan (revenue recognition) dalam IFRS (Yustina, 2013).

Didalam kerangka IASB (International Accounting Standards Boards) paragraph 37 menyatakan prudence merupakan tingkat kehati-hatian dalam pelaksanaan penilaian yang dibutuhkan untuk membuat estimasi ketika adanya ketidakpastian, sehingga asset atau pendapatan tidak berlebihan dan kewajiban atau beban disajikan secara wajar.

Cara melihat kehati-hatian adalah dengan hanya mencatat transaksi pendapatan atau aset jika sudah pasti, dan mencatat transaksi atau kewajiban bila memungkinkan. Aspek lain dari konsep kehati-hatian adalah bahwa kecenderungan menunda pengakuan atas transaksi pendapatan atau aset sampai yakin akan hal itu, sementara kecenderungan mencatat biaya dan kewajiban sekaligus, selama hal itu mungkin terjadi. Juga, secara teratur meninjau aset untuk melihat apakah nilainya menurun, dan kewajiban untuk melihat apakah jumlahnya meningkat (Groger dan Donna, 2007).

Singkatnya, kecenderungan dalam konsep kehati-hatian adalah untuk tidak mengenali keuntungan atau setidaknya menunda pengakuan mereka sampai transaksi yang mendasarinya lebih pasti. Kehati-hatian biasanya dilakukan dalam pengaturan, misalnya penyisihan piutang ragu-ragu atau cadangan persediaan yang tidak terpakai. Dalam kedua kasus tersebut, barang tertentu yang akan menyebabkan biaya belum teridentifikasi, namun orang yang bijaksana akan mencatat cadangan untuk mengantisipasi jumlah yang wajar dari biaya-biaya ini yang timbul di beberapa titik di masa depan (Groger dan Donna, 2007).

#### 2.4 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, penerapan yang memiliki kesamaan terhadap penelitian ini yaitu :

**Tabel 2.1**

#### **Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti (Tahun)</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Basuki, Indra Gunawan	Pengaruh Good <i>Good Corporate</i>	Variabel Independen :	Kepemilikan Manajerial,

	Siregar (2018)	<i>Governance</i> dan Prudent Akuntansi Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur 2014-2017	Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, prudent akuntansi  Variabel Dependen : Nilai Perusahaan	Kepemilikan Insitutsional, Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.  Prudent Akuntansi berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan
2	Yushita Marini dan Nisha Marina (2017)	Pengaruh Good <i>Good Corporate Governance</i> terhadap nilai perusahaan	Variabel Independen : Ukuran dewan komisaris, Komisaris, Independen, Ukuran dewan direksi, komite audit.  Variabel Dependen : Nilai Perusahaan	Komite audit tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.  Ukuran dewan komisaris, Komisaris, Independen, Ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan
3	Salsabila	Pengaruh <i>Good</i>	. Variabel	Dewan komisaris

	Sarafina (2017)	<i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan	Independen : Kinerja Keuangan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit  Variabel Dependen : Nilai Perusahaan	independen dan komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan  Dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan
4	Fika Fiadicha dan Rahmawati Hanny Y (2016)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility</i> dan Kinerja Keuangan terhadap nilai perusahaan	Variabel Independen : Ukuran dewan komisaris, Independensi dewan komisaris, Ukuran dewan direksi, Jumlah komite audit, <i>Corporate Social Responsibility, Return On Asset, Return On Equity</i>  Variabel Dependen : Nilai Perusahaan	Dewan komisaris, Jumlah komite audit, berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  Independensi dewan komisaris, Ukuran dewan direksi, <i>Corporate Social Responsibility, Return On Asset, Return On Equity</i> , tidak



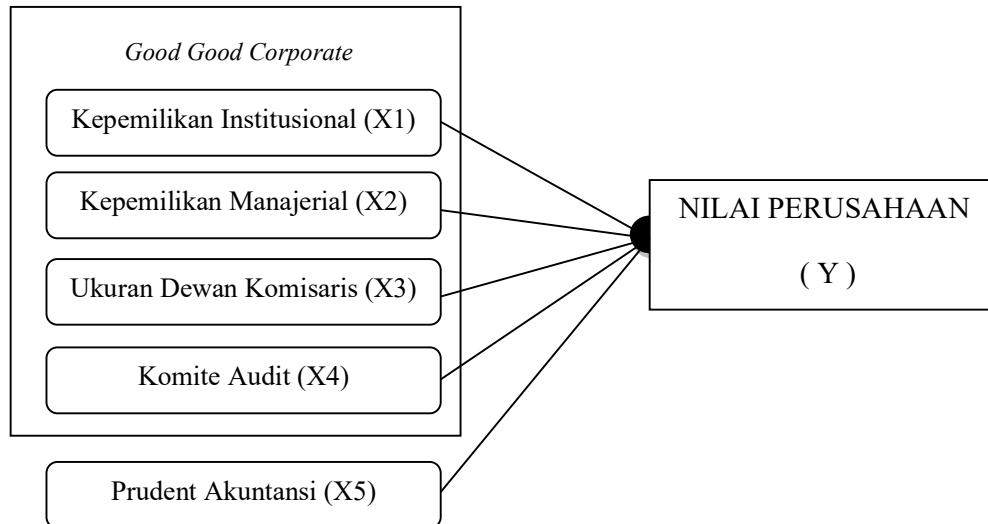
				berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
5	Angrita Denziana dan Winda Monica (2016)	Analisis ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan	Variabel Independen : Ukuran perusahaan dan profitabilitas  Variabel Dependen : Nilai Perusahaan	Ukuran perusahaan berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.  Profitabilitas berpengaruh dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Sumber: Penelitian Terdahulu, 2016-2018.

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah sebuah konsep bagaimana sebuah teori dapat saling berhubungan dengan berbagai macam faktor yang diidentifikasi sebagai sebuah masalah yang penting. Variabel independen dalam penelitian ini adalah prudent akuntansi dan *Good Corporate Governance* yang di dalamnya terdapat kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, dan ukuran komite audit. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan.

Kerangka penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1**

### **Kerangka Pemikiran**

## **2.6 Bangunan Hipotesis**

### **2.6.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan**

Kepemilikan institusional merupakan salah satu instrumen yang dapat mengurangi hambatan dalam tercapainya peningkatan nilai perusahaan yakni *agency conflict* yang terjadi antara pemegang saham dengan manajer. Keberadaan investor institusional dianggap mampu mengoptimalkan pengawasan kinerja manajemen dengan memonitoring setiap keputusan yang diambil oleh pihak manajemen selaku pengelola perusahaan karena dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal sehingga Kepemilikan institusional dapat mempengaruhi jalannya perusahaan dan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan (Nurzafa,2017).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Handayani,2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai

perusahaan hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional menjadi mekanisme yang handal sehingga mampu memotivasi manajer dalam meningkatkan kinerjanya yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan, sedangkan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Perdana dan Raharja,2014) mengatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

**H1: Terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan.**

### **2.6.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan**

Konflik keagenan disebabkan oleh adanya pemisah kepemilikan dan pengendalian di dalam suatu perusahaan. Hal ini dinyatakan bahwa semakin terkonsentrasi kepemilikan perusahaan pada satu orang maka kendali akan menjadi semakin kuat dan cenderung menekan konflik keagenan. Kepemilikan manajerial merupakan isu penting dalam teori keagenan yang menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajemen dalam suatu perusahaan maka manajemen akan berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adalah dirinya sendiri, kepemilikan manajerial dapat diartikan sebagai pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Direktur dan komisaris). Kepemilikan manajerial akan menjadi perhatian karena persentase kepemilikan manajerial akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan akan berdampak pula pada nilai perusahaan (Muryati, 2014).

(Jensen dan Meckling, 1976) menyatakan bahwa peningkatan kepemilikan manajerial dalam perusahaan mendorong untuk menciptakan kinerja perusahaan secara optimal dan memotivasi manajer bertindak hati-hati, karena ikut menanggung konsekuensi atas tindakannya. Kebijakan manajemen yang dibuat dalam mengungkapkan kinerja keuangan perusahaan dipengaruhi dengan adanya sebagian saham yang dimiliki oleh eksekutif perusahaan. Dengan adanya kepemilikan seperti ini, pihak agen (manajer) akan mendapat tekanan untuk lebih

hati-hati dalam menyajikan laporan keuangan dan termotivasi untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Muryati,2014), menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Enggar, 2013) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

**H2 : Terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan**

### **2.6.3 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Nilai Perusahaan**

Menurut FCGI (2001) dewan komisaris merupakan inti dari *Good Corporate Governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

Ukuran dewan komisaris sangat berpengaruh bagi perusahaan karena bertugas melakukan pengawasan atas kinerja perusahaan yaitu untuk memastikan bahwa manajemen telah benar-benar bekerja demi kepentingan perusahaan sesuai dengan strategi yang ditetapkan serta menjaga kepentingan para pemegang saham, ketika perusahaan memiliki ukuran dewan komisaris lebih tinggi, maka dewan komisaris akan mampu untuk melaksanakan tugas pengawasan dengan lebih baik, sehingga manajemen perusahaan akan memiliki kinerja lebih baik dan pada nantinya nilai perusahaan dapat meningkat (Anggraini, 2013).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Siahaan, 2013) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap nilai perusahaan hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya dewan komisaris maka akan semakin baik penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan

sedangkan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wardoyo dan Veronica,2013) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

**H3 : Terdapat pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap nilai perusahaan**

#### **2.6.4 Pengaruh Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan**

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan, pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan, audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terjadi antara manajer dan para pemegang saham, semakin tinggi kualitas audit maka transparansi pertanggungjawaban manajemen perusahaan dapat dipercaya (Junaidi, 2019).

Menurut (Hartono dan Nugrahanti, 2014) Komite audit punya tanggung jawab untuk memeriksa semua hasil kerja dan menumbuhkan sebuah hubungan kerja yang baik dan keharmonisan antara auditor external dan auditor internal. Dengan adanya komite audit diharapkan semoga di dalam perusahaan dapat memiliki sebuah hubungan kerja yang baik dengan menguatkan audit internal atau sistem pengendalian internal perusahaan. Dengan adanya komite audit di perusahaan yang berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan penyusunan laporan keuangan dan mengendalikan kegiatan internal perusahaan yang dapat mengurangi terjadinya kecurangan dalam mengelola perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rivandi, 2018) menemukan bahwa komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan hal ini sejalan dengan penelitian (Sarafina dan Saifi, 2017) juga menemukan bahwa komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan sedangkan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Perdana dan raharja, 2014) komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah:

#### **H4 : Komite audit Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan**

##### **2.6.5 Pengaruh Prudent Akuntansi terhadap Nilai Perusahaan**

Prudent akuntansi adalah prinsip yang menekankan kehati-hatian dalam pelaksanaan penilaian yang dibutuhkan untuk membuat perkiraan yang akan sangat diperlukan ketika berada pada kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau pendapatan tidak akan dilebih-lebihkan serta kewajiban atau pengeluaran tidak berlebihan (Helman, 2013).

Menurut IFRS prudent berkaitan dengan adanya revenue recognition yaitu pendapatan dapat diakui walaupun dalam bentuk potensi, selama memenuhi ketentuan dari pengakuan pendapatan (revenue recognition), Hal ini mengidentifikasi bahwa, seberapa kuat prinsip prudent yang diterapkan dalam pembuatan laporan keuangan, akan menimbulkan perbedaan hasil pelaporan keuangan yang disajikan, ini akan berdampak mempengaruhi nilai perusahaan (Yustina, 2013).

Prudent akuntansi sangat berpengaruh bagi perusahaan karena prudence dapat meningkatkan kualitas laba, atau dapat dikatakan bahwa prudence menghasilkan laba yang berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan membantu pengguna laporan keuangan dengan penyajian laba dan aktiva yang tidak overstate (Watts dalam Rosharlianti, 2018).

Prinsip prudent dalam pelaporan keuangan yang dimaksudkan untuk mengakui dan mengukur aktiva dan laba dilakukan dengan prinsip kehati-hatian oleh karena aktivitas ekonomi dan bisnis yang dilingkupi ketidakpastian (Manik, 2018). Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Thjen et al. (2012) mekanisme konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. sedangkan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Florensia dan Jusny,

(2014) menemukan bahwa prudent akuntansi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah:

**H5 : Terdapat pengaruh prudent akuntansi terhadap nilai perusahaan**